

Identifikasi Publik Berdasarkan Persepsi Situasional pada Isu Seputar Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 pada Publik Kota Malang

Public Identification of the Presidential Election Issues in 2014 Based on Situational Perception Toward Malang City's Public

¹⁾Amelia Magdalena, ²⁾Rachmat Kriyantono, ³⁾Bayu Indra Pratama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. (0341) 551611, Fax: (0341) 575755

¹⁾ameliamagdalenasoe@gmail.com, ²⁾rachmat_kr@ub.ac.id, ³⁾bayuindrap@ub.ac.id

Diterima: 31 Oktober 2015 || Revisi: 10 April 2015 || Disetujui: 14 April 2015

Abstrak - Isu menjadi titik awal munculnya sebuah krisis terutama bagi pemerintah karena dapat membentuk persepsi negatif dari masyarakat bila tidak sesegera mungkin diberi tindakan. Jika isu tersebut gagal diantisipasi dapat menimbulkan sebuah krisis yang dapat merugikan pihak terkait yang dalam hal ini adalah pemerintah. *Public relations* atau humas diharapkan dapat mengobservasi alur opini publik terhadap sebuah isu dan memanfaatkan isu tersebut guna meningkatkan reputasi dengan cara menciptakan sebuah perencanaan program yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi situasional, mengidentifikasi dan membuat kategori publik di kota Malang terhadap isu-isu terkait pemilihan umum presiden tahun 2014 menggunakan *Situational Theory of the Publics* (STP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi dan survei. Metode analisis isi merupakan metode pendahuluan untuk menentukan topik isu-isu seputar pemilihan umum presiden tahun 2014 yang sedang menjadi sorotan di koran Jawa Pos selama bulan April sampai Juni 2014 yang digunakan untuk variabel pertanyaan di kuesioner. Metode survei yang berfokus pada deskripsi variabel persepsi situasional dengan kuesioner sebagai alat instrumennya dan kemudian dipaparkan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa tipe persepsi situasional dari publik kota Malang adalah *problem-facing behavior*.

Kata kunci: isu, *situational theory of the publics*, persepsi situasional, publik, humas

Abstract-Issue become the starting point of the crisis emergence especially for government because it can form a negative perception from the public if government do not give action as soon as possible. If the issue failed to be anticipated can lead to crisis which could harm the government. Public relations are expected to observe the public's opinion flow about issue and take the advantage from the issue to increase reputation by creating appropriate program planning. The purpose of this research are to assess situational perception, identify and create Malang city's public category on issues which related to presidential election in 2014 using *Situational Theory of the Public* (STP). Methods that used in this research are content analysis and survey. Content analysis is a first method to determine topic of issues which related to presential election in 2014 that used for questionnaire question variables. The second method is survey which focused on description of situational perception variable with questionnaire as the instrument tool and then presented using descriptive statistical analysis technique in frequency table form. Based on result of this research, researchers found that the type of situational perception from Malang city's public is *problem-facing behavior*.

Keyword: issue, *situational theory of the publics*, situational perception, public, public relations

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan yaitu menyejahterakan rakyatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Suradinata (2002) bahwa pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Sebagai organisasi yang berkaitan dengan urusan masyarakat, pemerintah

harus dapat mengawasi dan mengetahui isu-isu yang sedang beredar di tengah masyarakat. Isu merupakan hal yang akan sering ditemui oleh sebuah organisasi baik dengan lingkup yang luas maupun yang kecil terutama bagi organisasi yang besar seperti pemerintahan. Seperti yang dijelaskan oleh Kriyantono (2012a) bahwa jika organisasi tersebut gagal mengantisipasi sebuah isu, ada kemungkinan isu tersebut berjalan liar dan tidak terkontrol

mengakibatkan munculnya krisis. Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa isu menjadi titik awal munculnya sebuah krisis terutama bagi pemerintah karena dapat membentuk persepsi negatif dari masyarakat bila tidak sesegera mungkin diberi tindakan. Harisson dalam Kriyantono (2012a:151) mendefinisikan “isu adalah berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik, yang jika berlanjut, dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi”.

Definisi isu lainnya dijelaskan oleh Regester dan Larkin dalam Jaques (2007:147) bahwa “isu merupakan sebuah kondisi atau peristiwa, baik internal maupun eksternal organisasi, yang jika berkelanjutan, akan memiliki dampak yang signifikan dari fungsi atau kinerja organisasi atau kepentingan di masa depan”. Berdasarkan definisi tersebut, isu dan perkembangannya di tengah publik harus menjadi perhatian khusus terutama bila isu tersebut bersifat negatif dan tidak menguntungkan pemerintah. *The Issue Management Council* dalam Kriyantono (2012a:152) menjelaskan bahwa jika terjadi *gap* atau perbedaan antara harapan publik dengan kebijakan, operasional, produk dan komitmen organisasi terhadap publiknya, maka di situlah muncul isu. Di sinilah kemampuan *public relation* (PR) atau staf hubungan masyarakat (humas) dibutuhkan oleh pemerintah.

Salah satu fungsi *public relation* yang dikemukakan oleh Cutlip, Center dan Candfield dalam Ruslan (2006:19) adalah “mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang mewakilinya atau sebaliknya”. *Public relation* diharapkan dapat mengobservasi alur opini publik terhadap sebuah isu dan memanfaatkan isu tersebut guna meningkatkan reputasi dengan cara menciptakan sebuah perencanaan program yang tepat (Kriyantono, 2012a). Dewey dalam Sriramesh, Moghan, & Wei (2007:309) menyatakan bahwa “publik muncul ketika individu-individu menghadapi permasalahan yang sama, menyadari permasalahan, dan mengatur untuk menyelesaikan sebuah masalah”. Seorang humas pemerintah dapat mengidentifikasi dan membuat kategori publik menggunakan *situational theory of the public* (STP) sehingga dapat menciptakan program-program tepat terkait isu-isu yang berpotensi mempengaruhi reputasi pemerintah. Dari program-program yang tepat terkait isu-isu ini, pesan yang ingin disampaikan oleh humas pemerintah

kepada masyarakat akan tersampaikan dengan baik dan respon dari masyarakat pun dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dengan mengetahui bagaimana opini, persepsi dan tanggapan masyarakat juga dapat menciptakan komunikasi timbal balik yang baik antara pemerintah dan masyarakat demi membangun saling pengertian dan dukungan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah salah satunya adalah pemilihan umum presiden.

Menurut Kriyantono (2012a:153), dengan mengetahui isu-isu potensial, organisasi dapat menyiapkan strategi yang tepat dengan menggunakan isu tersebut untuk meningkatkan reputasi. Isu-isu yang menjadi sorotan masyarakat ini harus menjadi perhatian dari humas pemerintah demi menciptakan reputasi positif. Publik dari isu-isu tersebut akan memberikan persepsi terhadap situasi yang berbeda sesuai dengan kecenderungan mereka merespon. Dengan mengaplikasikan *situational theory of public* maka akan membantu praktisi *public relations* agar mampu merencanakan program yang lebih akurat dan efektif bagi publiknya (Lattimore dalam Kriyantono, 2012a).

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kategori publik Kota Malang berdasarkan persepsi situasionalnya terhadap isu seputar pemilihan umum presiden tahun 2014? Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji persepsi situasional dan mengidentifikasi publik untuk mengkategorikan publik kota Malang terhadap isu terkait pemilihan umum presiden tahun 2014 dengan menggunakan *situational theory of the publics*.

"Situational Theory of the Publics memberi pedoman bagaimana melakukan identifikasi tentang siapa publik dan bagaimana perilaku komunikasi serta persepsi situasional mereka” (Kriyantono, 2012a:228). Teori Situasional berkembang hingga konsepsi klasik publik, maka, dengan memformalisasikan teori tersebut dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan mengukur publik dan opini publik (Grunig dalam Voss, 2009). Menurut Grunig, karena teori ini menjelaskan persepsi, sikap dan perilaku komunikasi dari publik dan terdiri dari dua variabel pokok yaitu variabel perilaku komunikasi dan variabel persepsi terhadap situasi (Kriyantono, 2012b). Variabel persepsi situasional merupakan variabel independen yang terdiri dari *problem recognition*, *constraint recognition*, *level of involvement*, dalam

perkembangan teorinya ditemukan variabel independen keempat yaitu *referent criterion* dan variabel perilaku komunikasi merupakan variabel dependen yang terdiri dari *information seeking*, *information processing* (Grunig dalam Sriramesh dkk 2007). Namun, sub variabel *referent criterion* akhirnya tidak digunakan karena Grunig dalam Illia, Lurati dan Casalaz (2013) menemukan bahwa *referent criterion* ini terindikasi hanya memiliki efek yang terbatas dalam variabel perilaku komunikasi.

Beberapa penelitian yang menggunakan STP dilakukan di luar Indonesia. Sriramesh, Moghan dan Wei (2007) menggunakan teori situasional untuk menilai perilaku komunikasi sampel masyarakat Singapura terhadap tingkat *customer service* di sektor retail. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan publik Singapura dalam sampel adalah *aware public* dan secara umum bersikap pasif, toleran dan nonkonfrontatif ketika mereka mengalami pelayanan konsumen yang buruk di toko retail. Penelitian STP lainnya berasal dari Rodriguez dan Lee (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti kesadaran publik Amerika terhadap bioterorisme sebagai isu-isu sosial, tingkat keterlibatan mereka atas isu tersebut dan bagaimana persepsi publik tentang isu-isu itu mempengaruhi komunikasi dan perilaku protektif.

Bila penelitian Sriramesh dkk yang memanfaatkan teknik pengumpulan data menggunakan *survey* (242 pelanggan retail) dan *focus group* (3 grup fokus), data dari penelitian Rodriguez dan Lee diperoleh dengan menggunakan kuesioner survei terstruktur melalui surat. Di Indonesia, Kriyantono (2012b) menggunakan pendekatan etnografi yang penelitiannya dilakukan pada penduduk korban krisis lumpur Lapindo Sidoarjo dengan menggunakan dua diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam sebagai respondennya. Hasilnya menggambarkan bahwa penduduk setempat adalah *aware public* karena mereka cenderung secara aktif mencari informasi juga sebagai publik aktif sejak mereka telah melakukan demonstrasi. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengadopsi dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dan mengembangkan dalam ranah isu politik khususnya pemilihan umum Presiden tahun 2014 pada publik di Kota Malang.

Teori STP digunakan pada penelitian ini untuk mengidentifikasi publik Kota Malang sehingga dapat dikategorikan berdasarkan persepsi situasionalnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat empat sub variabel dari persepsi situasional namun yang digunakan hanya tiga sub variabel yaitu *problem recognition*, *constraint recognition* dan *level of involvement*. Sriramesh dkk (2007:310) mendefinisikan *problem recognition* adalah “kondisi ketika seseorang berhenti berpikir tentang isu yang menciptakan masalah dan mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah”. *constraint recognition* mempresentasikan sejauh mana seseorang memersepsi pembatasan (gangguan) dalam suatu situasi yang membatasi kebebasannya untuk mengkonstruksi perilakunya (Kriyantono, 2012a). Grunig (Voss 2009:10) menjelaskan *level of involvement* didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang menghubungkan diri mereka dengan situasi, atau dengan kata lain, sejauh mana seseorang merasa dirinya terlibat dalam situasi. Variabel independen yang terakhir adalah *referent criterion*. Menurut Grunig dalam Sriramesh dkk (2007) variabel ini merupakan “sebuah solusi yang dibawa dari situasi yang sebelumnya ke sebuah situasi baru.”

Grunig dalam Kriyantono (2014:158) mengkombinasikan variabel *problem recognition* dan *constraint recognition*, kombinasi ini menghasilkan empat tipe persepsi situasional, yaitu: 1. *Problem-facing behavior* (terjadi bila *problem recognition* tinggi dan *constraint recognition* rendah); 2. *Contrained behavior* (terjadi bila *problem recognition* tinggi dan *constraint recognition* tinggi); 3. *Routine behavior* (terjadi bila *problem recognition* rendah dan *constraint recognition* rendah); 4. *Fatalistic behavior* (terjadi bila *problem recognition* rendah dan *constraint recognition* tinggi).

Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal (Kriyantono, 2014). Dan Regester & Larkin (Jaques, 2007) menjelaskan isu merupakan “sebuah kondisi atau peristiwa, baik internal maupun eksternal organisasi, yang jika berkelanjutan, akan memiliki dampak yang signifikan dari fungsi atau kinerja organisasi atau kepentingan di masa depan”. Isu dan publik merupakan sebuah hubungan atau keterkaitan karena masyarakat yang merespon sebuah peristiwa (isu) dapat dikatakan sebagai anggota publik. Dewey (Sriramesh dkk 2007:309) menyatakan bahwa publik muncul ketika individu-individu menghadapi permasalahan yang sama, menyadari permasalahan, dan

mengatur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan kata lain, isu-isu ini memunculkan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berusaha mengidentifikasi siapa publik melalui persepsi, sikap, dan perilaku komunikasi dalam isu-isu kontemporer melalui data-data kuesioner yang sudah teruji validitas dan reabilitasnya. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggambarkan tipe publik dalam isu-isu tertentu.

Penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, metode penelitian pendahuluan yang menggunakan metode analisis isi konstruk pada koran Jawa Pos selama April sampai Juni 2014 dengan unit tematik dan referensi untuk menentukan kategori isu-isu terkini yang akan digunakan sebagai variabel pertanyaan dalam kuesioner. Penulis menggunakan koran nasional Jawa Pos karena menurut Nadziroh (2014) “survei AC Niesel per triwulan pertama 2014 menempatkan Jawa Pos sebagai koran dengan pembaca terbesar di Indonesia”. Hasil yang diperoleh adalah isu-isu dengan persentase tertinggi dalam pemberitaan di koran Jawa Pos selama April hingga Juni 2014 yaitu isu koalisi, isu tahapan pelaksanaan pilpres (KPU), isu kampanye, isu elektabilitas survei, dan isu kampanye hitam (*black campaign*). Karena kategorisasi isu dibuat sendiri oleh penulis maka diperlukan uji reliabilitas dari pengkategorisasian tersebut. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk melihat interkoder atau kesepahaman antarkode sehingga penelitian dapat dijaga keobjektivitasnya. Uji reliabilitas ini dilakukan bersama 2 interkoder atau hakim. Rumus yang digunakan adalah Ole R. Holsty dan Scoot. Nilai akhir dari perhitungan reliabilitas interkoder ini adalah 0,88. Menurut Eriyanto (2011), angka reabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,75. Nilai akhir tersebut menjelaskan bahwa kategorisasi yang dibuat oleh peneliti adalah reliabel.

Metode yang kedua adalah metode survei dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala Likert tipe ordinal dengan menggunakan 4 skala dengan skor penilaian dari masing-masing alternatif jawaban yaitu:

- Sangat Setuju (SS) dengan skor 4,
- Setuju (S) dengan skor 3,
- Tidak Setuju (TS) dengan skor 2,
- Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

Jumlah butir pertanyaan pada kuesioner ini sebanyak 30 dan pada bagian terakhir responden akan dimintai beberapa data demografi dasar dengan variabel jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pendapatan, afiliasi politik dan pekerjaan. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan terkait sub variabel *problem recognition*, 10 pertanyaan terkait sub variabel *constraint recognition* dan 5 pertanyaan terkait sub variabel *level of involvement*. Hasil data dari kuesioner ini kemudian akan dianalisis menggunakan SPSS 15.0.

Sub variabel *problem recognition* dioperasionalkan untuk mengukur sejauh mana responden mengenali isu. Terdapat 3 indikator dan 3 deskriptor yang digunakan pada sub variabel sesuai yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Deskriptor Sub Variabel *Problem Recognition*

Indikator	Deskriptor
Mengenal isu	Sejauh mana seseorang mengenal sebuah isu
Memperhatikan isu	Sejauh mana seseorang memperhatikan isu
Mengidentifikasi isu	Mengidentifikasi seberapa besar isu tersebut berdampak pada dirinya

Sub variabel *constraint recognition* dioperasional sebagai pernyataan responden tentang sejauh mana mereka merasakan adanya pembatasan dalam menyampaikan pendapat. Ada 2 indikator dan 2 deskriptor pertanyaan untuk membantu penyusunan kuesioner, sesuai yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Deskriptor Subvariabel *Constraint Recognition*

Indikator	Deskriptor
Kebebasan berekspresi	Tingkat kebebasan seseorang berekspresi dalam situasi
Kemampuan mengontrol isu	Persepsi seseorang tentang kemampuan berbuat sesuatu terhadap isu.

Sub variabel yang terakhir adalah *level of involvement*. *Level of involvement* dioperasionalkan untuk mengukur tingkat keterlibatan. Indikator dan deskriptor yang digunakan hanya 1, sesuai yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3 Deskriptor Sub Variabel *Level of Involvement*

Indikator	Deskriptor
Tingkat keterlibatan terhadap isu	Sejauh mana seseorang mengaitkan dirinya dengan isu.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang dengan populasi menggunakan lima kecamatan yang

diwakilkan satu kelurahan dari masing-masing kecamatan untuk mewakili publik Kota Malang yaitu Kecamatan Lowokwaru yang diwakilkan oleh Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Kedungkandang yang diwakilkan Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Blimbing yang diwakilkan oleh Kelurahan Polehan, Kecamatan Klojen yang diwakilkan oleh Kelurahan Rampal Celaket dan Kecamatan Sukun yang diwakilkan oleh Kelurahan Pisang Candi. Kriteria responden dari penelitian ini adalah berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP Kota Malang dan telah berdomisili di kelurahan tersebut.

Penentuan sampel dari populasi menggunakan *multistage cluster sampling*. Populasi pemilih tetap kota Malang yaitu sebanyak 611.246 orang. Populasi ini kemudian dihitung menggunakan rumus Slovin dan hasilnya ditemukan angka 100 untuk sampel dari penelitian ini. Karena di Kota Malang terdapat 5 kecamatan yang populasinya sudah ditentukan kriteria-kriterianya maka dari masing-masing kecamatan diambil sampel menggunakan sampling kuota yaitu jumlah sampel dibagi jumlah kelurahan. Hasilnya ditemukan sampel dari penelitian sebanyak 20 responden per kecamatan.

Tabel 4 Jumlah Sampel Penduduk di setiap Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Sampel
Lowokwaru	Jatimulyo	20
Kedungkandang	Bumiayu	20
Blimbing	Polehan	20
Klojen	Rampal Celaket	20
Sukun	Pisang Candi	20

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang identitas responden menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54% lebih dominan dibandingkan perempuan yang hanya 46%. Dari keseluruhan sampel, mayoritas responden bukan anggota partai politik (98%) dan sisanya merupakan anggota partai politik (2%). Rincian kelompok usia yaitu 17-23 tahun (24%), 38-44 tahun (21%), 31-37 tahun (20%), 45 tahun keatas sebanyak 19% dan yang terakhir 24-30 tahun (16%). *Alpha Cronbach* dihitung mengukur tingkat kereliabelan dari kuesioner, hasil yang diperoleh adalah 0,941. Menurut Sugioyono (2011) alat ukur bila nilainya lebih dari 0,60 maka akan dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan *Alpha Cronbach* tersebut

menunjukkan bahwa nilai konsistensi internal dari tiap item dalam kuesioner dapat diterima.

Problem Recognition

Problem recognition dioperasionalkan sebagai pernyataan responden memikirkan atau menaruh perhatian pada beberapa masalah atau isu yang sedang terjadi. Jumlah seluruh responden dalam penelitian ini adalah 100 responden, 1 responden akan menjawab 15 pertanyaan terkait variabel *problem recognition* sehingga jumlah jawaban keseluruhan dari variabel ini adalah 1500 jawaban. Berdasarkan data pada tabel frekuensi (tabel 5), pilihan jawaban sangat setuju dijawab 187 kali oleh responden, pilihan jawaban setuju menjadi jawaban terbanyak yang dipilih oleh responden yaitu sebanyak 708 kali, responden menjawab tidak setuju sebanyak 499 kali dan yang terakhir pilihan jawaban sangat tidak setuju dipilih sebanyak 106 kali. Agar dapat menentukan tingkat *problem recognition*nya maka dilakukan perhitungan berdasarkan skor dari masing-masing alternatif jawaban. *Range* skor sub variabel ini adalah 0 – 3000 masuk dalam kategori tinggi dan 3001 – 6000 masuk dalam kategori rendah. Dari hasil perhitungan ditemukan angka 3.976, sehingga tingkat *problem recognition* yang dimiliki oleh responden masuk dalam kategori tinggi.

Tingkat *problem recognition* yang tinggi ini merupakan bentuk pernyataan bahwa responden mengenal dan memperhatikan isu-isu terkait pemilihan umum presiden 2014. Pada situasi tersebut, responden juga mulai mengidentifikasi bahwa isu-isu tersebut berdampak terhadap dirinya.

Bila ditinjau dari masing-masing kecamatan, dengan 20 responden dari masing-masing kecamatan maka respon yang diperoleh totalnya adalah 300 respon jawaban dengan *range* skor sub variabel 0 – 600 masuk dalam kategori rendah dan 601 – 1200 masuk dalam kategori tinggi. Hasil perhitungan skor dari kecamatan, yaitu kecamatan Lowokwaru sebesar 854, kecamatan Kedungkandang sebesar 810, kecamatan Blimbing sebesar 730, kecamatan Klojen sebesar 440 dan kecamatan Sukun sebesar 770. Berdasarkan *range* perhitungan skor, maka tingkat *problem recognition* dari kecamatan Lowokwaru, kecamatan Kedungkandang, kecamatan Blimbing, kecamatan Klojen dan kecamatan Sukun masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 5 Frekuensi *Subvariabel Problem Recognition*

	Lowok waru	Kedung Kandang	Blimbing	Klojen	Sukun	F	%
SS	54	32	13	41	47	187	12,5
S	164	155	145	117	127	708	47,2
TS	64	104	101	113	117	499	33,3
STS	18	9	41	29	9	106	7

Constraint Recognition

Constraint recognition dioperasionalkan sebagai pernyataan responden tentang sejauh mana mereka merasakan adanya pembatasan dalam menyampaikan pendapat. Total respon dari penelitian berdasarkan sub variabel *constraint recognition* ini berjumlah 1000 respon. Berdasarkan data tabel frekuensi (lihat tabel 6), responden cenderung menjawab setuju terhadap setiap pernyataan yang diajukan oleh peneliti terkait variabel *constraint recognition* dengan total frekuensi 452 dan tingkat persentasenya 45,2%. Kemudian pilihan jawaban sangat setuju dipilih responden sebanyak 99 kali, pilihan jawaban tidak setuju dipilih sebanyak 385 kali dan sisanya masuk dalam pilihan jawaban sangat tidak setuju. Hasil dari masing-masing pilihan jawaban dihitung menurut skor-skor alternatif jawaban, total skor yang diperoleh 2.586. *Range* skor dari sub variabel ini adalah 0 – 2000 masuk dalam kategori tinggi dan 2001 – 4000 masuk kategori rendah.

Berdasarkan total skor yang diperoleh menjelaskan bahwa responden penelitian ini berada dalam kategori tingkat *constraint recognition* yang rendah. Hasil tersebut menyatakan bahwa responden merasa tidak memiliki batasan atau bebas dalam mengekspresikan pendapat terkait isu-isu terkait pilpres tahun 2014.

Skor total di Kecamatan Lowokwaru adalah 556, Kecamatan Blimbing skor totalnya adalah 552, Kecamatan Kedungkandang skor totalnya adalah 488, Kecamatan Klojen skor totalnya adalah 515 dan Kecamatan Sukun skor totalnya adalah 458. *Range* skornya ada pada angka 0 – 400 untuk kategori tinggi dan 401 – 800 untuk kategori rendah. Berdasarkan *range* skor tersebut, kelima kecamatan masuk dalam tingkat *constraint recognition* yang rendah.

Tabel 6 Frekuensi *Constraint Recognition*

	Lowok waru	Kedung Kandang	Blimbing	Klojen	Sukun	F	%
SS	22	19	11	30	17	99	9,9
S	117	73	107	72	83	452	45,2
TS	56	85	75	81	88	385	38,5
STS	5	23	7	17	12	64	6,4

Hal yang menarik dalam hasil sub variabel *constraint recognition* ini bila dilihat dari tabel 6 adalah Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing memiliki tingkat ketersetujuan lebih tinggi dibandingkan tingkat ketidaksetujuannya. Sedangkan di Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun tingkat ketersetujuannya lebih rendah dibanding tingkat ketidak setujuannya. Bila ditinjau lebih dalam dari hasil kuesioner, ditemukan bahwa pertanyaan untuk variabel *constraint recognition* dengan indikator kemampuan mengontrol yang berada pada pertanyaan nomor 21-25 tingkat pemilihan ketidaksetujuannya meningkat sedangkan tingkat ketersetujuannya menurun dari respon yang ada saat merespon di pertanyaan nomor 15-20 dengan indikator kebebasan berekspresi (lihat tabel 7 dan tabel 8).

Hal ini menjelaskan bahwa responden cenderung merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu terhadap isu-isu pemilihan umum presiden tahun 2014.

Tabel 7 Hasil Koding Indikator Kebebasan Berekspreasi pada Variabel *Constraint Recognition*

	Lowok waru	Blimbing	Kedungkandang	Klojen	Sukun
SS	20	10	16	23	9
S	68	72	46	43	48
TS	10	18	29	28	20
STS	2	0	9	6	3

Tabel 8 Hasil Koding Indikator Kemampuan Mengontrol Isu pada Variabel *Constraint Recognition*

	Lowok waru	Blimbing	Kedungkandang	Klojen	Sukun
SS	2	1	3	7	5
S	49	35	27	29	23
TS	46	57	56	53	64
STS	3	7	14	11	8

Level of Involvement

Level of involvement dioperasionalkan untuk mengukur tingkat keterlibatan seseorang terhadap suatu isu. Total respon dari sub variabel ini berjumlah 500 respon. Berdasarkan data frekuensi (lihat tabel 9), separuh dari responden penelitian ini cenderung menjawab tidak setuju (54%) terhadap setiap pernyataan yang diajukan oleh peneliti terkait subvariabel *level of involment*. Diikuti pilihan jawaban setuju yang dipilih responden sebanyak 149 kali, kemudian pilihan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 68 kali dan sisanya masuk dalam pilihan jawaban sangat setuju. Untuk menentukan masuk

dalam kategori mana responden dari penelitian ini terkait tingkat keterlibatannya, maka diperlukan perhitungan untuk mengukur berdasarkan skor penilaian dari masing-masing pilihan jawaban dan skor akhirnya adalah 1.103. *Range* skor dari perhitungannya 0 – 1000 masuk dalam kategori rendah dan 1001 – 2000 masuk dalam kategori tinggi.

Melalui hasil perhitungan skor dari *level of involvement* responden, maka masuk dalam kategori tingkat *level of involvement* yang tinggi. Secara garis besar hasil tersebut menjelaskan bahwa mayoritas responden merasa terlibat dengan isu-isu terkait. Sehingga hal tersebut membuat tingkat *level of involvement* dari responden cenderung tinggi.

Penulis meninjau lebih dalam tingkat *level of involvement* dari masing-masing kecamatan. Skor akhir yang diperoleh dari Kecamatan Lowokwaru sebanyak 229, Kecamatan Kedungkandang Sebanyak 219, Kecamatan Blimbing sebanyak 208, Kecamatan Klojen sebanyak 229 dan Kecamatan Sukun sebanyak 218. *Range* skor penilaiannya adalah 0 – 200 untuk tingkat *level of involvement* rendah dan 201 – 400 untuk tingkat *level of involvement* tinggi. Berdasarkan skor akhir dari masing-masing maka tingkat *level of involvement* di lima kecamatan di Kota Malang ini masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 9 Frekuensi *Level of Involvement*

	Lowok waru	Kedung Kandang	Blimbing	Klojen	Sukun	11	%
SS	4	0	2	4	1	149	2,2
S	36	29	22	36	26	272	29,8
TS	45	61	58	45	63	68	54,4
STS	15	10	18	15	10	11	13,6

Persepsi Situasional dan Kategori Publik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkategorikan publik dengan mengidentifikasi bagaimana persepsi situasional publik Kota Malang terhadap isu terkait pemilihan umum Presiden periode tahun 2014-2019 dengan menggunakan *Situational Theory of the Publics*. Hasil yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden menunjukkan bahwa responden kelima kecamatan memiliki tingkat *problem recognition* tinggi, *constraint recognition* yang rendah dan *level of involvement* yang tinggi (Lihat tabel 9). Hal ini merupakan bentuk pernyataan dari responden bahwa mereka mengenal dan menyadari isu-isu terkait pemilihan umum presiden periode 2014-2019.

Responden pun mempersepsikan bahwa mereka merasa bebas dalam mengekspresikan pendapat terkait isu tersebut namun responden merasa tidak memiliki kemampuan berbuat sesuatu terhadap isu terkait. Hal tersebut terlihat saat responden cenderung menjawab alternatif jawaban tidak setuju yang tinggi atas indikator tentang pernyataan kemampuan mengontrol isu. *Level of involvement* yang tinggi juga ditunjukkan oleh responden melalui jawaban-jawaban yang ada menjadi ukuran tingkat keterlibatan responden terhadap isu-isu seputar pemilihan presiden tahun 2014 maka responden merasa dirinya merupakan bagian dari isu-isu terkait karena merasa terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu pemilihan umum presiden tahun 2014.

Grunig dalam Kriyantono (2014:158) mengkombinasikan variabel *problem recognition* dan *constraint recognition* yang menghasilkan 4 tipe persepsi situasional, yaitu: *problem-facing behavior* (terjadi bila *problem recognition* tinggi dan *constraint recognition* rendah), *contrained behavior* (terjadi bila *problem recognition* tinggi dan *constraint recognition* tinggi), *routine behavior* (terjadi bila *problem recognition* rendah dan *constraint recognition* rendah), dan *fatalistic behavior* (terjadi bila *problem recognition* rendah dan *constraint recognition* tinggi)

Pembagian tipe-tipe publik ini menjadi langkah yang harus dibuat agar pesan-pesan yang ingin disampaikan pada program terkait isu-isu pemilihan umum presiden tahun 2014 yang diciptakan oleh humas pemerintah kota Malang dapat efektif dan tepat sasaran kepada publiknya.

Tabel 10 Variabel Persepsi Situasional Responden

	<i>Problem Recognition</i>	<i>Constraint Recognition</i>	<i>Level of Involvement</i>
Lowokwaru	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kedungkandang	Tinggi	Rendah	Tinggi
Blimbing	Tinggi	Rendah	Tinggi
Klojen	Tinggi	Rendah	Tinggi
Sukun	Tinggi	Rendah	Tinggi

Penelitian ini, menunjukkan hasil bahwa responden secara keseluruhan memiliki tingkat *problem recognition* yang tinggi yang merepresentasikan bahwa mereka mengenal dan memperhatikan isu-isu terkait pemilihan umum presiden tahun 2014.

Responden juga merasa bahwa mereka tidak memiliki batasan dalam menyampaikan pendapat mengenai isu terkait atau *constraint recognition* yang

rendah. Berdasarkan kombinasi kedua sub variabel persepsi situasional yang dikemukakan oleh Grunig, maka peneliti menilai bahwa mayoritas responden penelitian ini masuk dalam tipe *problem-facing behavior*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa secara umum melalui identifikasi publik berdasarkan persepsi situasional dengan responden dari 5 kecamatan se Kota Malang, mayoritas tipe publik dari masyarakat Kota Malang adalah tipe *problem-facing behavior* dengan tingkat *problem recognition* yang tinggi dan *constraint recognition* yang rendah.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian, setelah memperoleh hasil tipe publik dari isu-isu seputar pemilihan umum presiden tahun 2014 ini pemerintah Kota Malang diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang tepat sesuai dengan tipe publik dari masyarakat Kota Malang sehingga pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan kebutuhan publiknya dan tepat sasaran.

Saran dari penulis perihal program-program bagi publik yang termasuk dalam tipe *problem-facing behavior* ini adalah pemberian sosialisasi mengenai pemilihan umum presiden tahun 2014 karena masih banyaknya publik yang tidak mengenal tentang istilah-istilah politik selama pilpres tersebut sehingga dapat menciptakan publik yang cerdas dalam pemilu, menciptakan *media center* atau posko yang terbuka untuk umum sebagai pusat kebutuhan informasi tentang segala kegiatan tahapan pelaksanaan pilpres tahun 2014, penerimaan saran terbuka agar aspirasi dari masyarakat terkait pemilu presiden dapat tersampaikan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada bapak Rachmat Kriyantono, Ph.D dan mas Bayu Indra Pratama, S.I.Kom, M.A atas bimbingan dan kerjasamanya dalam penelitian ini. Serta Puspita Wikanandha yang turut membantu dalam penyebaran kuesioner di lapangan sehingga penelitian ini cepat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto. (2011). Analisis Wacana, Pengantar Analisis Isi Media. Yogyakarta: LKIS

- Illia L., Lurati, F. dan Casalaz, R. (2013). *Situational Theory of Publics: Exploring a Cultural Ethnocentric Bias*. *Journal of Public Relations Research*, 25, 93-122
- Jaques, T. (2007). *Issue Management and Crisis Management: an Integrated Non-Linear, Relational Construct*. *Public Relation Review*, 33(2), 147-157.
- Kriyantono, R. (2012a). *Public Relation & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kriyantono, R. (2012b). *The Situational Theory of The Publics in an Ethnography Research: Identifying Public Response to Crisis Management*. *International Journal of Business and Social Science*, 20(3), 124-132.
- Kriyantono, R. (2014). *Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Lee, S., & Rodriguez, L. (2008). *Four Publics of Anti-Bioterrorism Information Campaigns: a Test of The Situational Theory*. *Public Relations Review*, 34, 60-62.
- Nadzirah, L. (2014). *Kerja Keras, Ciptakan Tren, Terus Fokus Pada Produk*. Radar Surabaya. Diakses dari <http://radarsurabaya.com/special/2014WOW/3.pdf>
- Ruslan, R. (2006). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi; Konsepsi dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sriramesh, K., Moghan, S., & Wei, D. L. (2007). *The Situational Theory of Publics in Different Cultural Setting: Consumer Publics in Singapore*. *Journal of Public Relation*, 19, 307-332.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suradinata, E. (2002). *Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Vicodata
- Voss, J. (2009). *An Empirical Analysis of Public Perception of Reclaimed Water Applying The Situational Theory of Publics* (Graduate School Dissertation, University of South Florida, 2009). Diakses dari <http://scholarcommons.usf.edu/etd/72>